



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 102 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Angkutan.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam operasional dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pengawasan, pengendalian, operasional dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. pelayanan informasi layanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat;
  - d. pemantauan operasional kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. penyelenggaraan proses administrasi pengesahan hasil uji kendaraan;
  - f. pelaksanaan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - g. pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
  - h. pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
  - j. pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - k. penyelenggaraan kesekretariatan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - l. pengelolaan keuangan dan aset UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - m. penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;

- n. penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- o. penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- p. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. menyusun rencana kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Angkutan.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

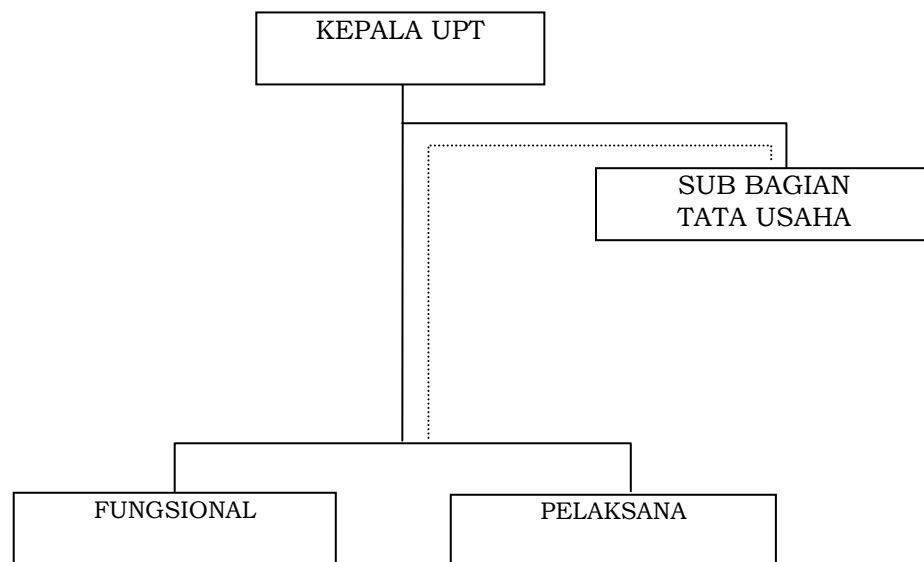
H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 102



LAMPURAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 102 TAHUN 2016  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM